

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Muhammad Yusuf¹, Agus Wijayanto², dan Puteri D Andani³.

^{1,3}BRI Institute

² Univ Islam Assyafi'iyah

E-mail: Muhammad.yusuf@bri-institute.ac.id

ABSTRACT

This Purpose of this study aims to determine the effect internal control systems and the quality of human resources on accrual-based financial reports mediated by the use of information technology. This research uses quantitative methods and data collection using survey methods. This research was conducted at the North Jakarta City Administration Regional Government Work Unit with the respondents being the managers / compilers of consolidated financial reports. The sampling technique was purposive. The data analysis method uses the Partial Least Square (PLS) technique with the Smart PLS ver3. The results of the analysis in this study indicate that: The government internal control system and the quality of human resources have a positive and significant effect on the use of information technology; Utilization of information technology, government internal control systems and quality of human resources have a positive and significant effect on the accrual-based financial reporting process; The use of information technology is an intervening on the influence of the government internal control system on the accrual-based financial report preparation process and the use of information technology is an intervening on the influence of the quality of human resources on the accrual-based financial reporting process.

Keywords: Internal control system, quality of human resources, and utilization of information technology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas sumber daya manusia terhadap proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan data dengan metode survei. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan responden adalah para pengelola dan penyusun laporan keuangan konsolidasi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive. Metode analisis data menggunakan teknik Partial Least Square (PLS) dengan program smartpls versi 3. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: Sistem pengendalian intern pemerintah dan Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi; Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern pemerintah dan Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual; Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan pemediasi (intervening) pada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan pemediasi (intervening) pada pengaruh kualitas SDM terhadap proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Kata Kunci: Sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan Pemanfaatan teknologi informasi.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Maraknya penggunaan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada organisasi sektor publik antara lain disebabkan karena adanya tekanan reformasi akuntansi sektor publik yang mendorong dilakukannya pengelolaan keuangan publik secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu juga terdapat tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, IMF, dan adanya standar akuntansi sektor publik internasional (IPSAS) yang mendorong penggunaan Laporan Keuangan Berbasis Akrual untuk organisasi sektor publik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan [1]. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan.

Tidak berjalannya sistem pengendalian intern, memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik yang berkualitas. Penyimpangan juga sering ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan [1].

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi sipemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan [1].

Proses penyusunan laporan keuangan juga dipengaruhi oleh Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, maka dapat membuka

peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan [2].

Penelitian terdahulu terkait dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah banyak dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian oleh Rosy Almaini [3] tentang pengaruh SDM dan teknologi informasi terhadap keberhasilan penerapan Laporan Keuangan berbasis akrual pada pemerintah provinsi Sumatera selatan menunjukkan bahwa SDM berpengaruh signifikan atau positif Terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dan teknologi informasi berpengaruh signifikan atau positif Terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Selain itu hasil Penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas SDM dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara [1], sedangkan hasil penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Pemerintah menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual [4]. Pada penelitian sebelumnya tersebut pengaruh sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, dan teknologi informasi, terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki hasil yang inkonsistensi. Penelitian ini juga merujuk dari hasil penelitian sebelumnya [5] yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang mana menunjukkan jika Pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya (*gap analisis*) adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dijadikan sebagai variabel intervening guna mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat memediasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi ? Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual ? Apakah Sistem Pengendalian Internal Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai *Intervening Variable*?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, selain itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Selain itu mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai *Intervening Variable*. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia, Terhadap Proses Penyusunan

Laporan Keuangan berbasis akrual dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang berhubungan dengan pengendalian internal, kualitas SDM dan laporan keuangan berbasis akrual bagi di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

2. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

2.1 Konsep Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD [6]. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan [7].

2.2 Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah [7]. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa penerapan basis akrual merupakan suatu keharusan dan harus dilaksanakan terutama untuk pengakuan pendapatan dan belanja [7].

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan [2].

2.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan [6].

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah, yang

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya: a). efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; b). keandalan Laporan Keuangan; c). pengamanan aset negara; dan d). ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. [8]

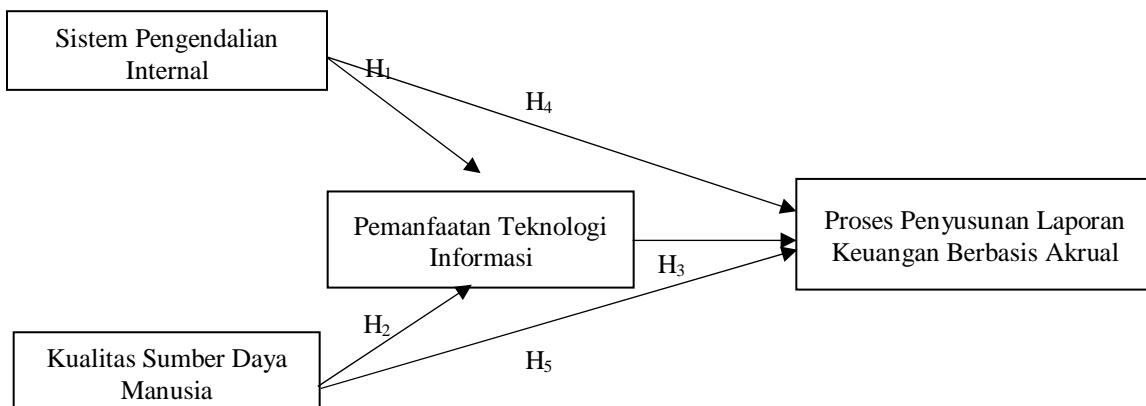
2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik sedangkan SDM dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seorang yang teakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, keahlian, ketrampilan, *human relations* [5].

Kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan professional. Kualitas sumber daya manusia selalu tidak akan terlepas dari sebuah kerja professional, sehingga sebuah kualitas kerja haruslah dilibatkan dalam konteks kerja yang merupakan profesi seseorang. Karenanya, tidak mengherankan apabila kualitas sumber daya manusia yang tinggi diharapkan muncul pada kaum professional, hal ini tidak mengherankan karena kaum profesional yang memiliki keahlian, organisasi dan kode etik yang memudahkan mereka untuk mengembangkan konsep, tolak ukur, bahkan ukuran yang bisa mereka gunakan untuk menilai dan membentuk citra diri mereka. Oleh sebab itu, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada Manajemen SDM itu sendiri.

2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini adalah pengaruh dari variabel X yaitu sistem pengendalian internal dan kualitas SDM terhadap variabel Y yaitu Proses Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel Z yang memediasi variabel X terhadap variabel Y, sebagaimana tertera pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Penelitian (Sumber: Data diolah)

2.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang juga memadukan dua metode yaitu melalui studi literatur dan didukung oleh analisis statistika deskriptif. Populasi dalam penelitian ini

adalah bagian Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan dibawahnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode *purposive sampling*. Alasan pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling (judgment sampling)* karena hanya akan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya penelitian ini [9].

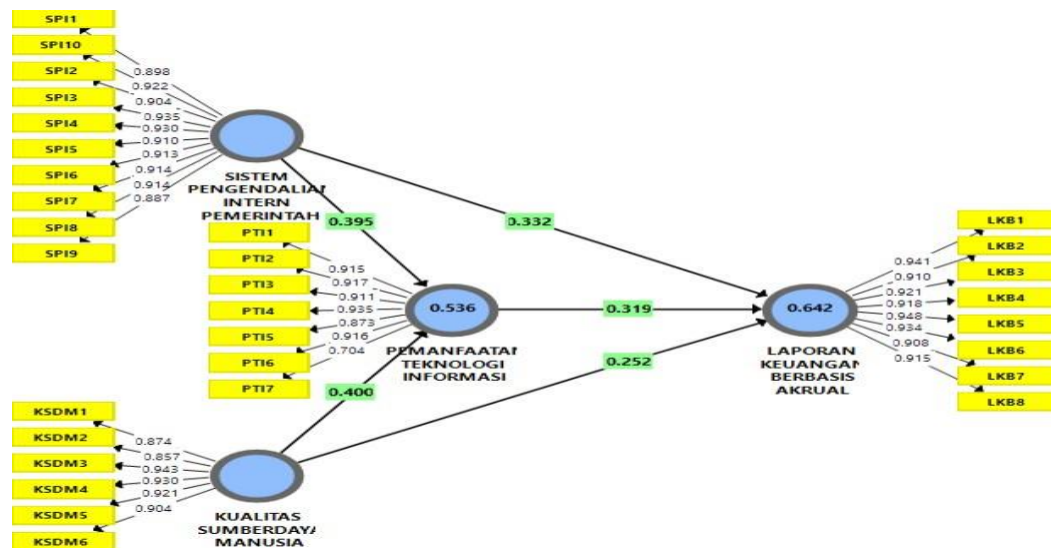
Penelitian ini menggunakan data primer. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner, yaitu dengan menyerahkan angket pernyataan kepada responden. Selanjutnya responden memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan. Untuk mengukur jawaban responden digunakan lima poin skala likert.

Responden dari para pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD/UKPD) dan Bendahara Pengeluaran yang berada dibawah Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara ditambah Pelaksana Akuntansi dari Suku Badan Pengelolaan Keuangan (SBPK) Kota Administrasi Jakarta Utara, semuanya berjumlah 82 Responden. Analisis data yang digunakan Menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis *Partial Least Square (PLS)*

Dalam penelitian ini, analisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) dan kualitas sumber daya manusia (KSDM) terhadap laporan keuangan berbasis akrual (LKBA) dengan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi informasi (PTI) akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *Partial Least Square (PLS)*.



Gambar 2. Hasil Estimasi Model PLS dengan teknik *algorithm* (Sumber: Data diolah)

Berdasarkan hasil estimasi model PLS pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk telah memiliki nilai *loading factor* di atas 0,7 sehingga model PLS dinyatakan telah memenuhi syarat validitas konvergen. Selain dengan melihat nilai *loading factor* masing-masing indikator, validitas konvergen juga harus dinilai dari nilai AVE masing-masing konstruk, seluruh konstruk dalam model PLS dinyatakan telah memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE masing-masing konstruk > 0,5. Berdasarkan hasil analisis PLS pada tabel di atas, nilai AVE seluruh konstruk baik yang berupa

dimensi maupun variabel telah melebihi 0,5 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen yang disyaratkan [10].

3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik kualitas pemanfaatan teknologi informasi. Pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin keterandalan suatu sistem teknologi yang digunakan, sebagai contoh adalah pencatatan nilai persediaan pada akhir periode pelaporan.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan mengembangkan Sistem Penatausahaan Aset Yang Terintegrasi. Aplikasi penatausahaan persediaan dibuat dengan tujuan untuk memberikan efisiensi dan efektifitas terhadap informasi permintaan dan pemakaian barang persediaan di lingkungan pemerintah daerah. Penatausahaan persediaan memberikan struktur organisasi dan kebijakan operasi yang jelas untuk menjaga dan mengendalikan barang-barang persediaan.

Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun, disinilah sistem pengawasan internal pemerintah berkontribusi untuk mengawasi apakah suatu sistem teknologi telah berfungsi dengan baik atau tidak. Diperlukan adanya pengawasan terhadap penggunaan teknologi untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi yang sah dan pembaharuan file master akan menghasilkan informasi yang akurat dan lengkap tepat pada waktunya. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi dikarenakan bahwa pengendalian internal dapat memberikan pandangan-pandangan mengenai titik-titik pengendalian yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem yang tengah digunakan untuk kemajuan pengembangan sistem teknologi informasi [10], [11].

3.3 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin baik kualitas pemanfaatan teknologi informasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan *professional*. Teknologi informasi sebagai pemberdayaan bagi suatu instansi dalam merespon dan memenuhi tuntutan pekerjaan tentunya akan meningkatkan pelayanan dan mampu mendukung langkah kompetitif, seperti kepemimpinan, diferensiasi, inovasi, pertumbuhan serta mampu memecahkan masalah koordinasi di antara SKPD/UKPD. Sistem informasi yang berorientasi pada manusia kini mulai beralih ke sistem yang didasarkan pada komputer, atau sistem manusia-mesin. Teknologi seperti komputer mulai bekerja bersama manusia untuk menjalankan tugas pemrosesan informasi dan data yang memang lebih sesuai bagi mereka ketimbang manusia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia yang berwawasan global dan berdaya saing. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan dalam mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti [12], yang menyatakan bahwa bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap teknologi informasi dikarenakan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas kerja yang baik, maka pegawai akan lebih mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi sebuah masalah yang muncul, utamanya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu pegawai tersebut akan lebih cepat dalam bekerja dan tidak harus beradaptasi dengan tugas yang dijalankan karena sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik, sehingga akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dibidangnya masing-masing.

3.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan berbasis akrual, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan berbasis akrual.

Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan suatu media yang digunakan untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2017 sudah menggunakan Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA). Aplikasi Rekonsiliasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis teknologi informasi tersebut membuat pelaksanaan pelaporan aset dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk Pelaporan yang Terintegrasi, Transparan dan Akuntabel. Sehingga membuat proses pencatatan aset oleh para pengurus barang menjadi lebih cepat. Sementara untuk laporan Keuangan sejak tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka membantu pencatatan administrasi keuangan daerah Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah, khususnya Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu sistem bidang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan komputer dan jaringan internet dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sudah dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mendorong keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar lebih efektif dan efisien [13], [14].

3.5. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Berbasis akrual

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan berbasis akrual, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan berbasis

akrual. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan pengendalian intern pada setiap SKPD mampu dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Hal ini dibuktikan dengan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemprov DKI selama tiga tahun berturut-turut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas efektivitas SPI [1], [14].

3.6 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan berbasis akrual, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setiap tahun selalu mengadakan Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua bagi para pegawai pengelola dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari diklat tersebut adalah agar peserta pelatihan mampu menyusun laporan keuangan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai di lingkungan SKPD Kota Administrasi Jakarta Utara setiap tahunnya selalu mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat tersebut ke BPSDM. Hal ini didasarkan pada bukti bahwa penempatan pegawai yang memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan peneliti dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual [3] [3]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah SKPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut. Tetapi hasil ini bertentangan dengan peneliti yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas laporan pertanggungjawaban Keuangan. meskipun adanya pelatihan-pelatihan untuk membantu penugasan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan [11].

3.7 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Akrua Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Mediasi (*intervening*)

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan berbasis akrual melalui teknologi informasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik kualitas

laporan keuangan berbasis akrual. Pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap laporan keuangan berbasis akrual saat ini dapat dilakukan secara mudah melalui pemanfaatan teknologi yang digunakan, sebagai contoh adalah penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka membantu pencatatan administrasi keuangan daerah Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan teknologi informasi yang diterapkan cukup memberikan kontribusi bagi terlaksananya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan penggunaan teknologi informasi telah memberikan peluang pemanfaatan kepada berbagai pihak untuk mendayagunakan, mengelola, mengakses informasi keuangan secara efektif, efisien, akurat, andal dan tepat waktu dan mendorong keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar lebih efektif dan efisien [1], [14].

3.8 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Berbasis Akrual Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Mediasi (*Intervening*)

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan berbasis akrual melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel mediasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas SDM maka semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang akan mendukung semakin baiknya kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual bagi para pegawai pengelola dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu saja diimbangi dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang bertugas membantu tugas para pegawai dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintahan Provinsi DKI yang sesuai dengan kaidah Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan fungsi akuntansi yang sebelumnya masih dilaksanakan secara manual saat ini telah difasilitasi dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi UKPD dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual [1] [14]. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan teknologi informasi yang diterapkan cukup memberikan kontribusi bagi terlaksananya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dengan penggunaan teknologi informasi telah memberikan peluang pemanfaatan kepada berbagai pihak untuk mendayagunakan, mengelola, mengakses informasi keuangan secara efektif, efisien, akurat, andal dan tepat waktu dan mendorong keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar lebih efektif dan efisien.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil data analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap laporan keuangan berbasis akrual dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara), menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah, Kualitas sumber daya manusia,

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik kualitas pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Sistem pengendalian intern pemerintah, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan berbasis akrual melalui teknologi informasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan berbasis akrual.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara Provinsi DKI Jakarta, dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan, yaitu hanya hanya mengambil variabel sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi informasi sebagai variabel independen sehingga hanya membatasi pengaruh terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan secara akrual. Oleh karena itu, perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Instansi/perusahaan/lembaga yang telah memberi dukungan yang membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta.
- [2] Mutiana, . D. Y. d. Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 3(2), pp. 1-17.
- [3] Nurillah (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vols. vol. 3, no. 2, , pp. 200-212, 2014.
- [4] Almaini, R. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, vol. 6(2), pp. 1-16.
- [5] Kusuma, M. d. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Pemerintah, *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 2(3), pp. 1-14.

- [6] Sa'adah, K. S. R. d. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, vol. 8(2), pp. 1-16.
- [7] Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*, Jakarta.
- [8] Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- [9] Widodo. (2018). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Edisi 1, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- [10] Sofyan, Y. d. H. K. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan partial Least Square Path Modeling*, Jakarta: Salemba Infotek.
- [11] Maryanti, R. (2017). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi," *Jurnal Akuntansi Audit dan Istem Informasi Akuntansi (Jasa)*., vol. 1(1), pp. 1-20.
- [12] Amrullah, I. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, vol. 04(1), pp. 1-34.
- [13] Muryani, S. P. P. d. F. A. (2016). Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengawasan Kerja Dan Spesialisasi Kerja Terhadap Pemahaman Beban Kerja Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Dinas Pasar Kota Semarang), *Jurnal of Management*, vol. 2(2), pp. 1-18.
- [14] Erawati, T. d. K. D. (2018). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek keperilakuan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 21(2), pp. 1-19.
- [15] Chodijah, S. d. H. N. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta), *Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis*, vol. 8(1), pp. 1-15.
- [16] Andi. (2003). *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*, Semarang: Wahana Komputer.
- [17] Ghozali, I. (2006). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 2*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- [18] Megaria, D. d. E. (2019). Kajian Terhadap Peranan Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Audit Komputerisasi (Studi Kajian Teoritis), *Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*., vol. 3(1), pp. 1-14.
- [19] Nadir, R. d. H. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, *Jurnal Akuntabel*, vol. 14(1), pp. 1-12.